



Kemendikdasmen
Pusat Penguatan Karakter



Cerdas
Berkarakter

RENCANA STRATEGIS

Pusat Penguatan Karakter

2025-2029





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan penguatan karakter dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu *pendidikan bermutu untuk semua* dengan dukungan partisipasi semesta menuju Indonesia Emas 2045. Renstra ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan arah kebijakan, sasaran, dan program penguatan karakter berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional serta responsif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan sumber daya manusia ke depan.

Penyusunan Renstra Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025–2029 mengacu pada kerangka perencanaan pembangunan nasional, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, Renstra ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian program penguatan karakter, serta berbagai isu strategis seperti penguatan budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira, inklusivitas dan kebinekaan, penuntasan kekerasan di satuan pendidikan, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kinerja, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Pusat Penguatan Karakter untuk periode lima tahun ke depan. Seluruh rumusan tersebut diarahkan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai karakter peserta didik melalui kolaborasi Catur Pusat Pendidikan, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pengembangan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini menjadi dasar dan pedoman bagi Pusat Penguatan Karakter dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), serta pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam koordinasi perencanaan dan pengendalian program, penyusunan laporan kinerja, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (outcome).



Akhir kata, diharapkan Rencana Strategis Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029 dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memperkuat karakter bangsa melalui ekosistem pendidikan. Sinergi, komitmen, dan partisipasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi Renstra ini guna mewujudkan generasi Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan berkepribadian luhur.

Jakarta, 31 Januari 2026

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Ruspriya Putri Utami, S.E., M.A.

NIP.198309052009122005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK.....	4
DAFTAR ISTILAH	3
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum	6
1.2. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	16
2.1. Visi Pusat Penguatan Karakter	16
2.2. Misi Pusat Penguatan Karakter	16
2.3. Tujuan Pusat Penguatan Karakter.....	16
2.4. Sasaran Kinerja Pusat Penguatan Karakter	17
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	20
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal.....	22
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penguatan Karakter	27
3.4. Kerangka Regulasi.....	27
3.5. Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN	32
BAB V	
PENUTUP	36
Matrik Target Kinerja Program/Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Renstra Kemendikdasmen 2025-2029	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Catur Pusat Pendidikan	7
Gambar 1.2.	Capaian terkait Penguatan Karakter	8
Gambar 1.3.	Capaian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	10
Gambar 1.4.	(a) Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kanal Cerdas Berkarakter dan (b) Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Korupsi	11
Gambar 1.5.	Capaian Produksi dan Penyebarluasan Konten Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat	12
Gambar 1.6.	Capaian Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Materi Penguatan Karakter Terkait a) Profil Pelajar Pancasila, b) Iklim Keamanan Satuan Pendidikan, dan c) Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran Yang Demokratis.....	13
Gambar 1.6.	Struktur Organisasi Pusat Penguatan Karakter	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan Pusat Penguatan Karakter	12
Tabel 2.2.	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pusat Penguatan Karakter	13
Tabel 2.3.	Sasaran Kinerja dan Indikasi Risiko	14
Tabel 3.1.	Kerangka Regulasi Pusat Penguatan Karakter.....	24
Tabel 3.2.	Aparatur Sipil Negara Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025	27
Tabel 3.3.	Proyeksi Kebutuhan SDM Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025-2029	28
Tabel 4.1.	Indikator Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025-2029	29
Tabel 4.2.	Perencanaan Anggaran Penguatan Karakter di PUSPEKA Tahun 2025-2029	37



DAFTAR ISTILAH

4S Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun
AKSI Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
AKM Asesmen Kompetensi Minimum
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN Aparatur Sipil Negara
BMN Barang Milik Negara
GNSTA Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
IKK Indikator Kinerja Kegiatan
IKP Indikator Kinerja Program
IKPA Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis
K/L Kementerian/Lembaga
Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LBANM Lingkungan Belajar Aman, Nyaman, dan Menyenangkan
LK Laporan Keuangan
MBG Makan Bergizi Gratis
Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OPD Organisasi Perangkat Daerah
PISA Programme for International Student Assessment
Pemda Pemerintah Daerah
Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Perpres Peraturan Presiden
PNS Pegawai Negeri Sipil
PP Peraturan Pemerintah
PPK Penguatan Pendidikan Karakter
PPKS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
PPKSP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
RB Reformasi Birokrasi
Renja Rencana Kerja
Renstra Rencana Strategis
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker Satuan Kerja



SDM Sumber Daya Manusia
SIMT Sistem Informasi Manajemen Talenta
SK Sasaran Kegiatan
SP Sasaran Program
SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS Sasaran Strategis
TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPPK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
UPT Unit Pelaksana Teknis
UU Undang-Undang
UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WBBM Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK Wilayah Bebas dari Korupsi
WTP Wajar Tanpa Pengecualian
ZI Zona Integritas



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita merupakan arah pembangunan Indonesia yang menegaskan komitmen bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing global. Salah satu pilar utamanya adalah pendidikan bermutu untuk semua yang menjadi visi besar Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Delapan Dimensi Profil Lulusan hadir sebagai wujud nyata dari pendidikan bermutu untuk semua, yang mengarahkan murid menjadi insan yang mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kolaborasi dan komunikasi sehingga menjadi generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing yang menjadi pilar utama peradaban berkelanjutan.

Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan secara konkret dalam keseharian, karena nilai-nilai ini hanya dapat terbentuk melalui kebiasaan positif yang konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan positif tersebut tertuang dalam Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat, dan Tidur Cepat. Pembiasaan baik ini jika dipupuk dan dipelihara dapat tumbuh subur menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi kepribadian murid dan membentuk budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan sebagai satu kesatuan ekosistem karakter yang berlandaskan inklusivitas dan kebinekaan, memastikan bahwa setiap murid, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau perbedaan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, dan berprestasi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, penguatan pendidikan karakter per Juli 2025, sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) satuan pendidikan sudah memiliki tim untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman. Kemendikdasmen kemudian menyempurnakan program tersebut menjadi Program Budaya Belajar yang Aman, Nyaman, dan Gembira untuk mewujudkan budaya belajar aman dari kekerasan dan berbagai risiko, nyaman dalam lingkungan sosial dan fisik, serta gembira dalam belajar dan bermain untuk mendukung tumbuh kembang murid yang utuh dan berkarakter.



Budaya belajar aman nyaman dan gembira adalah perwujudan budaya belajar yang sehat, aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan inklusif untuk mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dengan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan, melalui pelibatan aktif Catur Pusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat, dan media). Pelibatan Catur Pusat Pendidikan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan menghargai kebhinekaan. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama memberikan teladan sikap saling menghormati perbedaan, sedangkan satuan pendidikan menjadi ruang aman bagi seluruh murid untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Selanjutnya, masyarakat berkontribusi melalui budaya dan interaksi sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan.

Pelibatan media dalam Catur Pusat Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Pada era digital, media memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan karakter anak. Media bukan sekadar sarana informasi, tetapi juga ruang pembentukan nilai, sikap, dan perilaku, karena pendidikan karakter tidak dapat berdiri sendiri di ruang kelas. Ketika pesan pendidikan karakter diperkuat oleh media, nilai-nilai kebaikan tidak hanya diajarkan di satuan pendidikan, tetapi juga diulang, diperbincangkan, dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat. Melalui kolaborasi Catur Pusat Pendidikan, pesan-pesan karakter dapat menjangkau lebih luas dan memberikan dampak yang lebih mendalam bagi murid, keluarga, dan masyarakat baik di dunia nyata dan di dunia digital. Sinergi keempat pusat pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memelihara keberagaman, serta menumbuhkan generasi yang mampu hidup rukun, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam masyarakat yang majemuk.

Keluarga, khususnya orang tua, memegang peranan kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan disabilitas secara optimal. Dalam konteks Indonesia yang sedang mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045, inklusivitas dan partisipasi penuh anak-anak dengan disabilitas menjadi sangat penting. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua dari anak disabilitas menghadapi tantangan besar dalam mendampingi anak mereka, salah satunya adalah minimnya akses terhadap sumber belajar yang relevan, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan.



Gambar 1.1 Catur Pusat Pendidikan

Selama tahun 2020-2024, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) telah melaksanakan berbagai program penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan, yaitu penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan, serta penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, Puspeka melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya Sosialisasi dan Diseminasi Buku Saku Profil Pelajar Pancasila, Sosialisasi dan Diseminasi Buku Inklusivitas dan Kesetaraan Gender, Program Roots Indonesia: Pencegahan Perundungan di Sekolah, Program Pencegahan Intoleransi, dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan.



Gambar 1.2. Capaian terkait Penguatan Karakter

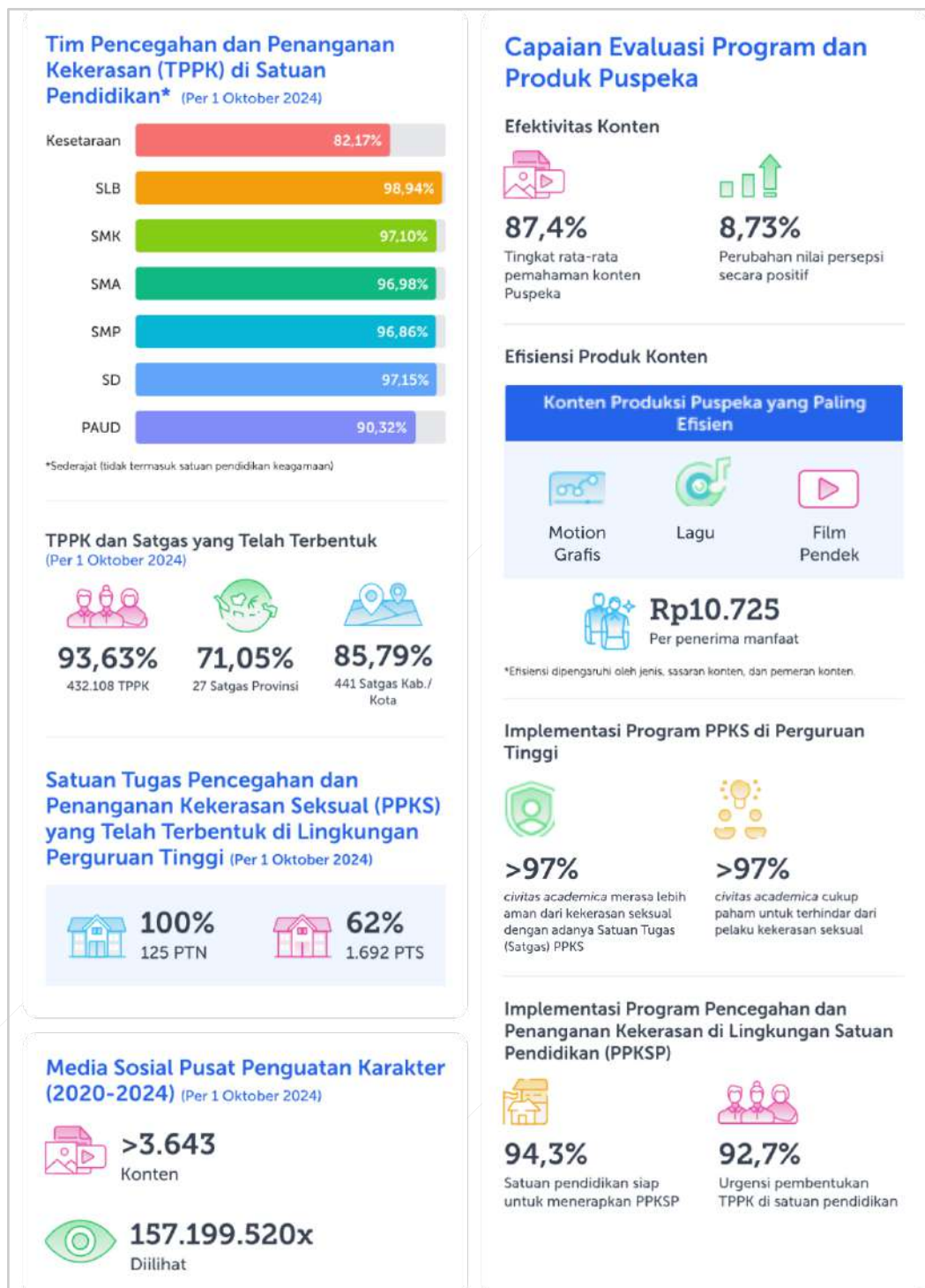
Puspeka telah menyelesaikan Buku Pendamping Orang Tua terkait Profil Pelajar Pancasila (PPP) untuk jenjang PAUD pada tahun 2022. Penyusunan buku ini merupakan kolaborasi bersama SEAMEO CECCEP, sebuah lembaga antar pemerintah yang mencakup wilayah regional Asia Tenggara dan berfokus bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan parenting yang turut berkomitmen pada pemajuan sumber daya manusia di jenjang pendidikan PAUD. Untuk memperkuat tujuan dari buku pendamping tersebut, Puspeka menyelenggarakan workshop secara berkala di beberapa daerah, sebagai ruang diseminasi dan kesesuaian materi kebijakan Profil Pelajar Pancasila di dalam buku pendamping. Pada tahun 2022 dan 2023 telah diberikan Paket Donasi Buku Bacaan dan Buku Panduan Orang Tua dan Guru PAUD sebanyak total 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) set buku.

Sejak tahun 2023, Puspeka melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi dalam rangka membangun iklim inklusivitas dan kesetaraan gender. Kegiatan ini dalam rangka menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemasyarakatan nilai-nilai inklusivitas. Upaya tersebut meliputi



penyebaran materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa berkebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan diseminasi dilaksanakan secara luring, dengan pertemuan tatap muka secara langsung. Puspeka menjelaskan proses, cara, dan tujuan membangun lingkungan inklusif tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan dari peserta. Program diseminasi telah dilakukan sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) peserta dan sasaran diseminasi jumlah 1.795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) peserta.

Pada rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebanyak 10.606 (sepuluh ribu enam ratus enam) sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas Program Roots Indonesia. Pada sekolah yang telah diintervensi tersebut, Program Roots telah dilaksanakan sebanyak 8.662 (delapan ribu enam ratus enam puluh dua) kali dan menghasilkan kurang lebih sebanyak 173.240 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) siswa agen perubahan. Selain itu, lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau sebanyak 10.336 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam) sekolah peserta bimtek Program Roots Indonesia telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Beberapa sekolah melaksanakan Program Roots lebih dari 1 (satu) kali dengan rincian, yaitu 2.569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) sekolah melaksanakan 2 (dua) kali, 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) sekolah melaksanakan 3 (tiga) kali, dan 169 (seratus enam puluh sembilan) sekolah melaksanakan 4 (empat) kali. Pada tahun 2024, Puspeka akan mengintervensi 1.050 (seribu lima puluh) sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK berdasarkan asesmen tahun 2023. Kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator guru dilakukan secara luring dan daring, bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Dinas Pendidikan setempat.



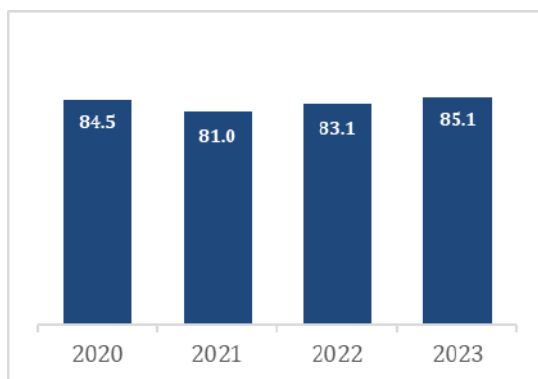
Gambar 1.3. Capaian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Kemendikbudristek berkolaborasi dengan 5 (lima) kementerian dan 3 (tiga) lembaga untuk turut memenuhi amanah percepatan pembentukan TPPK dan satuan tugas (satgas) kabupaten/kota. Kolaborasi ini terangkum ke dalam Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

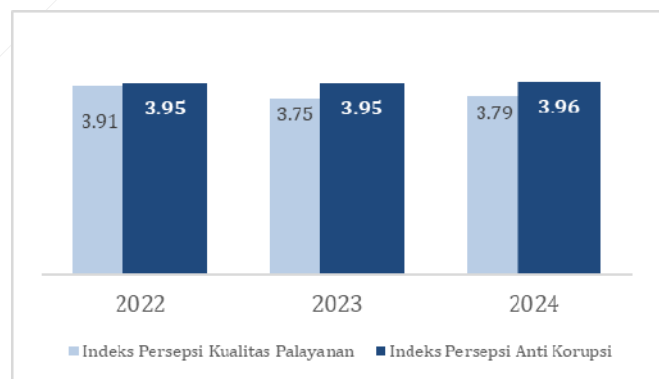


Satuan Pendidikan (PPKSP) yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023. Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman PPKSP pun dilakukan berbentuk Perjanjian Kerja Sama tentang PPKSP. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, masing-masing kementerian dan lembaga dapat meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dari 5 (lima) kementerian dan 3 (tiga) lembaga tersebut dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, ramah, dan aman demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkepribadian. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi: (1) penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan (3) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Capaian pembentukan TPPK per Oktober 2024 adalah sebesar 432.108 (empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan) satuan pendidikan atau 93,63% (sembilan puluh tiga koma enam puluh tiga persen), 27 (dua puluh tujuh) satuan tugas provinsi atau 71,05% (tujuh puluh satu koma nol lima persen), dan 441 (empat ratus empat puluh satu) satuan tugas kabupaten/kota atau 85,79% (delapan puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen). Capaian pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi negeri (PTN) telah 100% (seratus persen) membentuk tim satgas atau 125 (seratus dua puluh lima) PTN, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta mencapai 62% (enam puluh dua persen) atau 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) perguruan tinggi swasta.



(a)

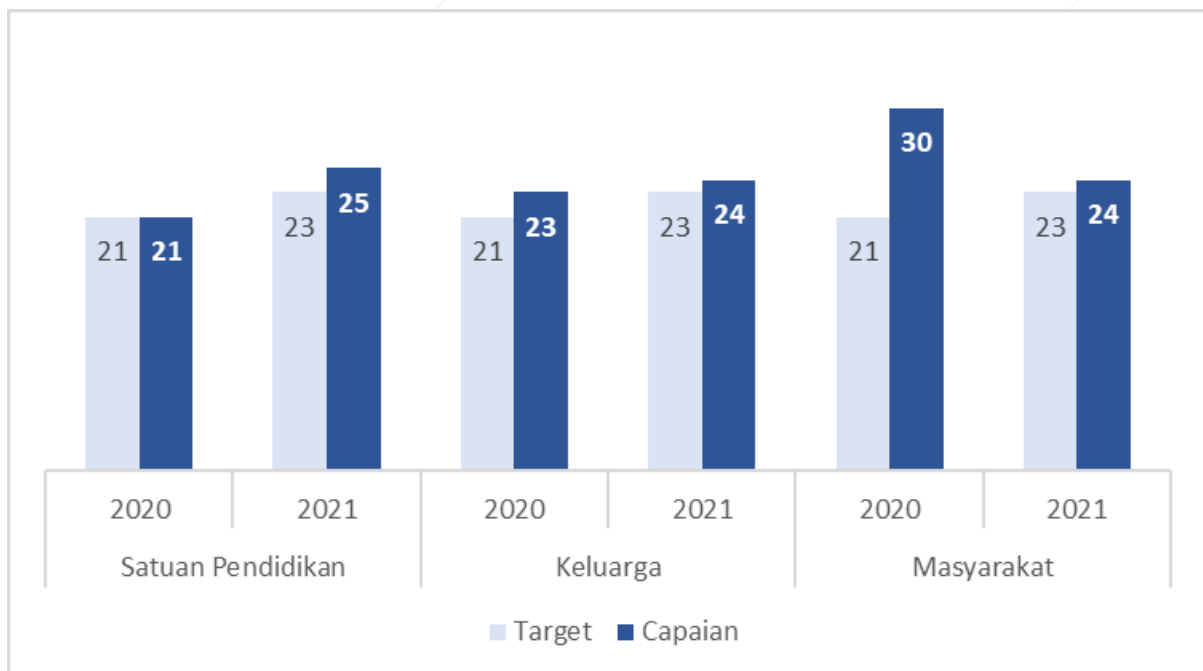


(b)

Gambar 1.4. (a) Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Kanal Cerdas Berkepribadian dan (b) Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Satisfaction Survey) terhadap kanal Cerdas Berkarakter berada dalam kategori Memuaskan dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, pada survei persepsi pelayanan publik dan persepsi anti korupsi yang dilakukan setiap tahun, Puspeka senantiasa konsisten mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Puspeka melaksanakan program penguatan karakter melalui produksi dan penyebarluasan konten dengan sasaran utama satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan program ini menunjukkan capaian positif dan melampaui target selama 2 (dua) tahun, yaitu 2020 dan 2021. Pada sasaran satuan pendidikan, capaian meningkat dari 21 (dua puluh satu) konten pada tahun 2020 menjadi 25 (dua puluh lima) konten pada tahun 2021. Pada sasaran keluarga, capaian meningkat dari 23 (dua puluh tiga) menjadi 24 (dua puluh empat) konten. Sementara itu, pada sasaran masyarakat, Puspeka telah memproduksi dan menyebarkan sebanyak 30 (tiga puluh) konten dan tetap melampaui target pada tahun 2021 dengan capaian 24 (dua puluh empat) konten.

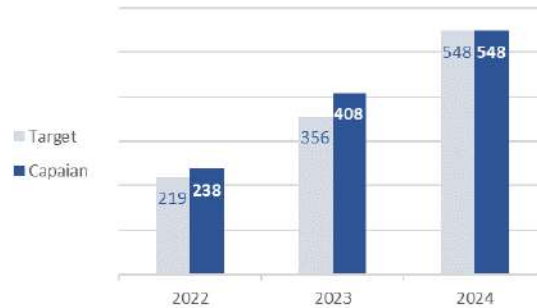


Gambar 1.5. Capaian Produksi dan Penyebarluasan Konten Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

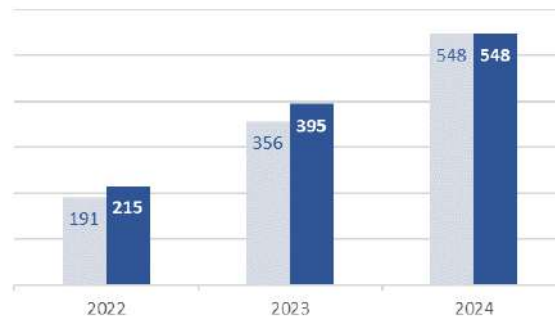
Kemudian pada tahun 2022-2024, Puspeka melaksanakan penguatan karakter kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota terkait: (a) Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan; (b) penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem



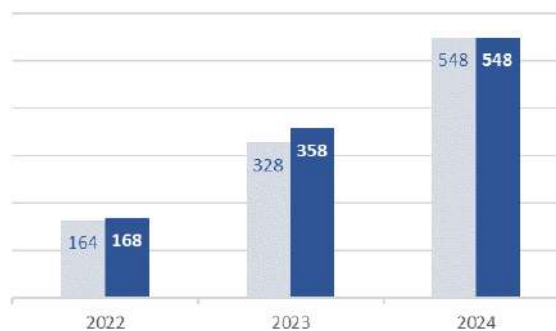
pendidikan; (c) penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan; dan (d) berkomitmen terhadap penguatan karakter.



(a)



(b)



(c)

Gambar 1.6. Capaian Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Materi Penguatan Karakter Terkait a) Profil Pelajar Pancasila, b) Iklim Keamanan Satuan Pendidikan, dan c) Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran Yang Demokratis

Sedangkan, untuk Rencana Strategis 2025-2029 dalam rangka menyempurnakan dan menjawab tantangan dan permasalahan ke depan, Puspeka melaksanakan penguatan karakter kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota terkait: (i) penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori membudaya; (ii) penguatan karakter iklim



keamanan di satuan pendidikan dengan kategori membudaya; dan (iii) penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori membudaya.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penguatan Karakter dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dihadapkan berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang Pusat Penguatan Karakter adalah sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Dukungan untuk peningkatan kualitas SDM unggul salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi penguatan delapan karakter utama, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Pembentukan karakter positif juga diperkuat melalui melalui pembiasaan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang dapat dipahami dari 3 (tiga) kategori pertumbuhan dan perkembangan, yaitu: (i) Sehat Fisik, Mental, dan Spiritual pada kebiasaan Bangun Pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan Sehat dan Bergizi, dan Istirahat Cepat; (ii) Cerdas dan Kreatif pada kebiasaan Gemar Belajar; dan (iii) Peduli dan Tanggung Jawab Sosial pada kebiasaan Bermasyarakat. Selain itu, terdapat juga Pertemuan Pagi Ceria seperti Senam Anak Indonesia Hebat untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, keceriaan, dan nasionalisme pada anak-anak Indonesia dan menguatkan karakter anak melalui aktivitas positif, sehat, dan menyenangkan. Peningkatan peran catur pusat pendidikan khususnya masyarakat diperlukan untuk memperkuat implementasi pendidikan karakter secara sistematis dan berkelanjutan. Organisasi masyarakat berperan sebagai mitra strategis Kemendikdasmen karena memiliki kedekatan langsung dengan komunitas, memahami dinamika sosial budaya lokal, serta memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik. Melalui pendekatan yang partisipatif, organisasi masyarakat dapat menjadi penggerak utama dalam memperluas pelaksanaan program pendidikan karakter di luar satuan pendidikan. Beberapa kolaborasi dengan organisasi masyarakat dari berbagai unsur seperti organisasi keagamaan, kepemudaan, profesi, pendidikan, pengasuhan, dan juga pemerintah dari negara mitra telah dilakukan baik melalui Nota Kesepahaman, perjanjian kerjasama, maupun melalui surat permohonan secara langsung untuk adaptasi program



dan kegiatan pendidikan karakter yang telah dilakukan oleh Kemendikdasmen.

Selain dalam hal penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas SDM unggul juga didukung dalam manajemen dan pengembangan talenta prestasi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dari sisi infrastruktur, telah tersedia Sistem Informasi Manajemen Talenta yang berjalan dan terdokumentasi dengan baik dalam menyimpan basis data ajang talenta dan peserta didik yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang interaktif, terintegrasi dengan data prestasi nasional maupun internasional, serta bermanfaat untuk pemetaan talenta secara komprehensif. Dalam aspek sumber daya manusia, pengembangan talenta dan prestasi didukung oleh tim kurator, pelatih, dan pemandu talenta yang berpengalaman dalam membawa peserta didik berprestasi di tingkat nasional hingga internasional, serta diperkuat dengan keterlibatan alumni berprestasi yang berperan sebagai teladan sekaligus mentor bagi generasi penerus.

1.2.2. Permasalahan

- a. Fenomena generasi strawberry atau generasi instan menggambarkan kecenderungan sebagian anak muda yang memiliki kreativitas dan nilai estetika tinggi, namun rapuh dalam menghadapi tekanan hidup, mudah menyerah, serta cenderung memilih jalan pintas daripada berproses dengan sabar. Kondisi ini diperparah oleh gaya hidup nokturnal yang mengganggu kesehatan fisik dan mental, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan konsentrasi belajar. Selain itu, krisis moral dan etika yang melanda generasi muda menjadi ancaman serius bagi penguatan karakter bangsa, yang salah satunya disebabkan oleh berkurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, tantangan karakter generasi muda saat ini tidak hanya berkaitan dengan fenomena generasi strawberry dan gaya hidup nokturnal, tetapi juga mencakup isu kesehatan mental serta lemahnya internalisasi nilai kebangsaan yang perlu mendapat perhatian bersama.
- b. Problematika kesehatan fisik dan psikis, seperti obesitas. Prevalensi obesitas pada remaja usia 13-15 tahun meningkat pesat, mencapai sekitar 21,8% pada 2018, dibandingkan dengan 10,5% pada 2007. Selain itu, menurut Mendiknas per November 2024, 960 ribu pelajar dan mahasiswa di Indonesia telah terjerat dalam praktik judi online. Tidak hanya itu, problematika lainnya menurut BNN sebanyak 312.000 remaja terpapar narkoba. Lebih lanjut, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health



Survey (I-NAMHS), survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 – 17 tahun di Indonesia, menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental di tahun 2022. Jika tidak segera diatasi, problematika ini dapat membentuk persoalan yang akan menghambat terbentuknya karakter positif mengancam kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya mengganggu keberlanjutan pembangunan bangsa.

- c. Nilai-nilai luar akibat pengaruh globalisasi dan arus budaya asing yang tidak selalu selaras dengan jati diri bangsa kerap diadopsi tanpa filter, mengikis rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Di sisi lain, krisis moral dan etika semakin mencolok, maraknya perilaku tidak jujur, rendahnya rasa tanggung jawab, dan pudarnya rasa hormat terhadap sesama menjadi cerminan kemunduran budi pekerti.
- d. Kekerasan di dunia pendidikan, baik dalam bentuk fisik, verbal dan ranah daring, menunjukkan adanya kegagalan menanamkan empati, pengendalian diri, dan penyelesaian masalah secara damai. Adanya akses internet tanpa pengawasan yang cukup dapat membuka peluang terjadinya perundungan siber (cyber bullying), paparan konten negatif, penipuan digital, hingga eksploitasi seksual daring. Sebanyak 42 persen anak merasa tidak nyaman atau takut karena pengalaman daring dan 50,3 persen telah melihat gambar seksual di media sosial. Namun, hanya sekitar 37,5 persen anak yang pernah menerima informasi tentang cara agar tetap aman saat daring (UNICEF, 2023). Lebih lanjut, sekitar 66% anak-anak di Indonesia telah terpapar konten pornografi daring, 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan terlibat langsung dalam aktivitas seksual terkait pornografi. 39% anak pernah mengirimkan foto terkait aktivitas seksual melalui media daring.
- e. Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, terdiri atas lebih dari 600 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 187 kepercayaan (Sumber: SP 2020, BPS, Kemendikbud, Kemenag). Namun, menurut Setara Institute (2020), masih tercatat 180 pelanggaran kebebasan beragama di 29 provinsi, yang menunjukkan tantangan nyata dalam mewujudkan toleransi dan harmoni sosial. Di sisi lain, data Kemenko PMK (2022) menunjukkan bahwa dari sekitar 2,19 juta anak dengan disabilitas usia 5–19 tahun, hanya 269 ribu anak yang menempuh pendidikan formal, menggambarkan kesenjangan besar dalam akses pendidikan inklusif. Hasil PISA 2022 (OECD) juga menunjukkan adanya perbedaan capaian numerasi antara anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki unggul rata-



rata 9 poin lebih tinggi. Namun, studi yang sama menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak dapat meningkatkan capaian matematika hingga 45–89%, menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam perkembangan karakter dan kemampuan belajar anak. Fakta-fakta tersebut menegaskan perlunya penguatan karakter bangsa berbasis nilai inklusivitas, kesetaraan, dan kebinekaan. Pendidikan dan lingkungan sosial harus menjadi wadah penumbuhan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga setiap individu — tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau gender — memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, berkeadilan, dan harmonis.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi Pusat Penguatan Karakter

Visi Pusat Penguatan Karakter mendukung visi pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain:

“terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

2.2. Misi Pusat Penguatan Karakter

Sesuai tugas dan kewenangan, Pusat Penguatan Karakter berperan dalam mendukung pelaksanaan misi Kementerian. Adapun misi Pusat Penguatan Karakter adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran; dan
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.3. Tujuan Pusat Penguatan Karakter

Perumusan tujuan Pusat Penguatan Karakter ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan Pusat Penguatan Karakter, Sekretariat Jenderal, Kemendikdasmen adalah internalisasi program penguatan karakter peserta didik.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penguatan Karakter

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2029
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori membudaya	70% 387



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2029
	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan Penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya.	70% 387
	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	50% 276

2.4. Sasaran Kinerja Pusat Penguatan Karakter

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Pusat Penguatan Karakter, diperlukan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pusat Penguatan Karakter

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter						
IKK 1.1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori membudaya	Persentase (%)	10%	25%	45%	60%	70%
IKK 1.2	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan Penguatan Karakter	Persentase (%)	10%	25%	45%	60%	70%



Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya						
IKK 1.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	Persentase (%)	5%	15%	25%	40%	50%
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter						
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal Sangat Baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan Sasaran Program di atas, Pusat Penguatan Karakter mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penguatan Karakter. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Sasaran Kinerja dan Indikasi Risiko

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	
1.	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan	1. Analisis kebutuhan tidak akurat atau terlalu umum



No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
	kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori membudaya	2. Kebijakan teknis tidak implementatif di lapangan 3. Modul/panduan sulit dipahami atau tidak aplikatif 4. Koordinasi pusat-daerah bersifat formalitas 5. Keterbatasan SDM pelaksana di daerah
2.	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan Penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	1. Koordinasi lintas mitra dan satuan pendidikan lemah 2. Penyebarluasan materi tidak menjangkau seluruh sasaran 3. Modul/panduan LBNM sulit dipahami atau tidak kontekstual 4. Tidak adanya forum koordinasi tematik berkelanjutan
3.	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	1. Kurangnya pemahaman inklusivitas di daerah 2. Koordinasi dan pendampingan inklusi belum terstruktur 3. Modul/panduan tidak ramah akses atau tidak tersedia dalam format inklusif 4. Analisis kebutuhan belum spesifik pada kelompok sasaran inklusi
	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	
1.	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	1. Indikator kinerja belum berbasis outcome 2. Data Monev tidak akurat / instrumen tidak reliabel 3. Rendahnya respon dan kualitas data pelaporan



No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
		4. Laporan tidak konsisten dan tidak terstandar Monitoring dan evaluasi belum berbasis integrasi data
2.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal Sangat Baik	1. Keterlambatan pencairan dan pembayaran 2. Revisi anggaran dan pelaporan keuangan terlambat 3. Pertanggungjawaban keuangan tidak lengkap atau tidak tepat waktu 4. Koordinasi perencanaan kegiatan dan anggaran kurang matang 5. Monitoring IKPA belum terintegrasi dengan rencana kegiatan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mendukung pemerataan partisipasi pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan tata kelola Kementerian. Hal tersebut juga mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang didukung oleh Unit Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

3.1.1. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan

- a. Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
- b. Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
- c. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.



3.1.2. Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan

- a. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- b. Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
- c. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.
- d. Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, serta pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olahraga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karier dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
- f. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (*food waste*), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.



3.1.3. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kemendikdasmen menyadari kontribusi pendidik non-ASN juga sama besarnya dengan pendidik ASN, untuk itu pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru tanpa memandang status kepegawaian, salah satunya melalui pemberian aneka tunjangan baik untuk guru ASN maupun untuk guru non-ASN.

3.1.4. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan

- a. Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
- c. Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.

3.1.5. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, serta mendukung visi dan misi Kemendikdasmen. Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:



3.2.1. Partisipasi Pendidikan

- a. Penambahan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang PAUD/TK/ sederajat dalam mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun.
- b. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pemadanan pelaksanaan program bantuan pembiayaan pendidikan untuk menjaga ketepatan sasaran.

3.2.2. Kualitas Pendidikan

- a. Penambahan besaran harga satuan (*unit cost*) pada pemberian tunjangan/bantuan/insentif untuk guru non-ASN dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik untuk peningkatan kualitas proses pengajaran dan pembelajaran.
- b. Penumbuhan karakter positif, semangat kebangsaan, serta kecerdasan emosional dan sosial secara konsisten dan berkelanjutan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Generasi Emas, sebagai penekanan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari capaian akademik, namun dari perkembangan nilai, sikap, dan kepribadian peserta didik.
- c. Pengimplementasian Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam mendukung pengembangan kematangan moral, spiritual, emosional, dan kepedulian sosial.
- d. Mewujudkan budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira dalam rangka menumbuhkan semangat belajar, memperkuat hubungan sosial yang positif, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- e. Penguatan inklusivitas dan kebinekaan dalam mendukung lingkungan yang adil, hormat, dan menghargai persamaan serta menerima perbedaan.
- f. Menanamkan nilai kemanusiaan dan kebersamaan melalui proses pembelajaran di lingkungan pendidikan melalui interaksi sehari-hari di satuan pendidikan, kegiatan kolaboratif, dan proyek sosial yang melibatkan peserta didik secara aktif.
- g. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya untuk kebutuhan bidang-bidang baru yang terus berkembang seperti kecerdasan buatan, data science, dan teknologi ramah lingkungan, dilakukan dengan menyiapkan pemandu talenta melalui program pelatihan, sertifikasi, serta jejaring nasional dan internasional. Pemandu talenta disiapkan melalui



kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemangku kepentingan (stakeholders), serta lembaga seperti PPSDM melalui pelatihan di bidang Artificial Intelligence (AI), koding, serta program pengembangan kapasitas digital.

- h. Menghadirkan layanan pembinaan yang inklusif dengan memperluas pembinaan bagi peserta didik berprestasi melalui Program Bina Talenta Indonesia berbasis sistem manajemen talenta (SIMT). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data prestasi untuk menyediakan fitur profil peserta didik berprestasi secara komprehensif, integrasi dengan jalur pendidikan dan beasiswa nasional, serta keterhubungan dengan platform rekrutmen industri.
- i. Memperkuat pembinaan berbasis riset, teknologi, dan inovasi, pelibatan ahli sebagai pembina ajang internasional, pelaksanaan simulasi lomba internasional, serta pengaktifan jejaring alumni berprestasi internasional untuk meningkatkan daya saing sekaligus menyiapkan peserta didik menghadapi ajang internasional. Selain itu, perluasan ekosistem pengembangan talenta dengan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha, dunia industri, komunitas, hingga ekosistem inovasi global.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem digital nasional yang menyediakan ruang layanan pendidikan berbasis teknologi.
- k. Membangun kemitraan strategis dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan teknologi informasi (pemerintah, swasta, komunitas, dan lembaga internasional) guna mendukung transformasi.
- l. Menguatkan peran komunitas sebagai agen perubahan dalam transformasi digital pendidikan melalui pembinaan, penguatan kapasitas, dan ekosistem berbasis kolaborasi.
- m. Penguatan jejaring dan diplomasi pendidikan regional dengan mendorong Pusat SEAMEO menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

3.2.3. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas

- a. Penguatan budaya kerja RAMAH dan SANTUN yang dilaksanakan berlandaskan nilai dasar BerAKHLAK dengan menanamkan nilai-nilai yang menjadi sifat dan kebiasaan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan



kerja yang nyaman, pelayanan publik yang prima, dan institusi yang dapat menjadi teladan bagi ekosistem pendidikan, membangun kepercayaan publik melalui dampak positif bagi masyarakat, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja.

- b. Penerapan Sistem Merit Kementerian dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan SDM, yang terdiri dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin, serta pengelolaan kepegawaian berbasis sistem informasi.
- c. Pelaksanaan pelayanan publik prima dengan mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan penyelenggara pelayanan publik untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan Kemendikdasmen.
- d. Mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna memastikan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, akurat, dan akuntabel, sehingga mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, akuntabel, serta tepat waktu guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
- f. Berperan sebagai penggerak reformasi tata kelola belanja pendidikan serta berperan sentral dan strategis dalam memastikan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemendikdasmen berjalan efisien, transparan, berintegritas, dan selaras dengan kebijakan nasional (P3DN, UMK, digitalisasi PBJ).
- g. Peningkatan pengelolaan arsip dinamis Kemendikdasmen, pengelolaan arsip menjadi layanan informasi publik, serta penyelamatan arsip bersejarah Kementerian.
- h. Menyusun strategi peningkatan kepatuhan satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen pada pelaporan progres pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- i. Melakukan strategi pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
- j. Memperkuat citra positif Kemendikdasmen melalui optimalisasi fungsi hubungan masyarakat dan pembangunan hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
- k. Mengoptimalkan fungsi strategi komunikasi dan publikasi dalam meningkatkan pemahaman dan memenuhi kebutuhan



informasi publik mengenai program dan kebijakan Kemendikdasmen.

- l. Mengoptimalkan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan memastikan bahwa informasi disebarluaskan secara akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- m. Mengoptimalkan pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) dan perpustakaan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan publik.
- n. Mengoptimalkan hubungan kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan, serta melakukan optimalisasi fungsi hubungan masyarakat melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
- o. Penerapan sistem pembelajaran terintegrasi melalui platform Wiyata Kinarya, digitalisasi dan infrastruktur pembelajaran, serta penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran mulai dari pembelajaran sampai dengan evaluasi.
- p. Penerapan Data Quality Management (DQM) sebagai upaya meningkatkan kualitas Dapodik untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan bersifat akurat, lengkap, konsisten, valid, dan mutakhir. DQM menjadi landasan penting dalam menjaga integritas data pendidikan yang dikumpulkan melalui sistem Dapodik untuk pendidikan dasar dan menengah.
- q. Memperkuat tata kelola SPBE Kementerian dengan menyediakan layanan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
- r. Mengimplementasikan kebijakan keamanan data dan informasi di lingkungan kementerian.
- s. Penguatan implementasi SAKIP secara menyeluruh mulai dari tingkat kementerian hingga satuan kerja dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berbasis hasil.
- t. Penguatan konsistensi dan integrasi antara dokumen perencanaan kementerian dengan dokumen perencanaan nasional, serta penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran.
- u. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant untuk pemenuhan pencapaian SPM bidang Pendidikan.



- v. Penguatan regulasi yang berkualitas dan adaptif, dengan mendorong harmonisasi kebijakan pendidikan dan penataan peraturan berbasis hasil evaluasi substantif.
- w. Pengembangan sistem informasi hukum internal terpadu, yang dapat digunakan untuk penataan regulasi, layanan bantuan hukum, dan pemantauan pelaksanaan peraturan.
- x. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum, termasuk publikasi regulasi pendidikan, advokasi hukum, dan hasil evaluasi regulasi.
- y. Penguatan Kolaborasi lintas unit dan pemangku kepentingan, melalui pengembangan mekanisme koordinasi, konsultasi, dan sinergi program secara berkelanjutan guna memastikan bahwa proses reformasi hukum di sektor pendidikan terlaksana secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan. Membangun mekanisme koordinasi lintas unit dan antarinstansi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama pendidikan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan efisiensi sumber daya.
- z. Memperkuat tata kelola kerja sama internasional dan nasional di bidang pendidikan melalui mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang terintegrasi antara unit utama, satuan kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta Kementerian/Lembaga mitra.
- aa. Mendorong tindak lanjut aktif atas kesepakatan kerja sama pendidikan.
- bb. Membuat sistem pengadministrasian kerja sama yang akuntabel dan transparan.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penguatan Karakter

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Pusat Penguatan Karakter dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, serta mendukung visi dan misi Kemendikdasmen. Arah kebijakan dan strategi Pusat Penguatan Karakter adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan karakter positif, semangat kebangsaan, serta kecerdasan emosional dan sosial secara konsisten dan berkelanjutan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Generasi Emas, sebagai penekanan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari capaian akademik, namun dari perkembangan nilai, sikap, dan kepribadian peserta didik.



- b. Pengimplementasian Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam mendukung pengembangan kematangan moral, spiritual, emosional, dan kepedulian sosial.
- c. Mewujudkan budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira dalam rangka menumbuhkan semangat belajar, memperkuat hubungan sosial yang positif, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- d. Penguatan inklusivitas dan kebinekaan dalam mendukung lingkungan yang adil, hormat, dan menghargai persamaan serta menerima perbedaan.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Kegiatan, beberapa regulasi yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai bidang tugas Pusat Penguatan Karakter pada periode waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Pusat Penguatan Karakter

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Regulasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan perlu disinergikan dengan Budaya Belajar Aman, Nyaman, dan Gembira sehingga Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan perlu direvisi.	2026
2.	RPM tentang Penguatan Karakter pada Satuan Pendidikan	· Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat · Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri	2026



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan. • Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter. • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut. (Permendikbud 23/2015 dan Permendikbud 20/2018). • Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.	



3.5. Kerangka Kelembagaan

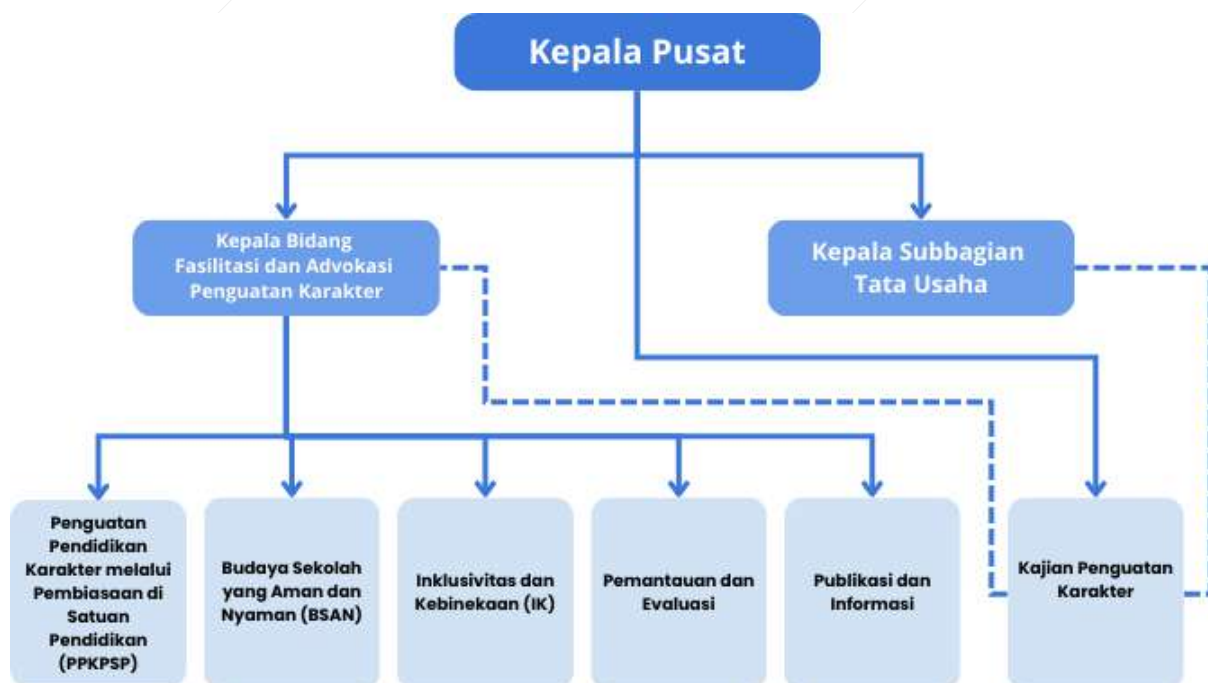
Pusat Penguatan Karakter harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penguatan Karakter menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
- 2) pelaksanaan penguatan karakter;
- 3) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
- 4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

3.5.1. Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Pusat Penguatan karakter yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka struktur organisasi Pusat Penguatan Karakter adalah sebagai berikut:



Gambar 1.6. Struktur Organisasi Pusat Penguatan Karakter



3.5.2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya agar mampu mendukung pencapaian tujuan Pusat Penguatan Karakter.

Tabel 3.2. Aparatur Sipil Negara Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	3
2.	Jabatan Fungsional	29
3.	Jabatan Pelaksana	39
Total		71

Data per 31 Desember 2025 -

- Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan satuan kerja sesuai hasil analisis beban kerja di Pusat Penguatan Karakter. Selain itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja. Tabel xx menggambarkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Pusat Penguatan Karakter sampai tahun 2029.

Tabel 3.3. Proyeksi Kebutuhan SDM Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025-2029

No.	Satuan Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pejabat Struktural	3	3	3	3	3
2.	Jabatan Fungsional	76	76	76	76	76
3.	Jabatan Pelaksana	66	66	66	66	66
Total		145	145	145	145	145

Data per 31 Desember 2025



BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan target kinerja guna mendukung tercapainya kebijakan penguatan karakter pada level nasional, telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai sebagai bentuk keberhasilan pencapaian (outcome) sebuah program. IKK ini sendiri merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari sebuah kebijakan.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah					
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik					
IKP 2.3.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu.	8,3% 46	21,7 % 120	38,3 % 212	53,3 % 295	63,3 % 350
7576	Kebijakan Penguatan Karakter					
SK	Terwujudnya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan					
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	10% 56	25% 138	45% 249	60% 332	70% 387
7576.QM B.004	Layanan penguatan karakter Peserta Didik	6				



Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah					
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	10% 56	25% 138	45% 249	60% 332	70% 387
7576.QM B.005	Layanan Penguatan Karakter iklim keamanan satuan pendidikan	3				
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	5% 28	15% 83	25% 138	40% 221	50% 276
7576.QM B.006	Layanan Penguatan Karakter inklusivitas satuan pendidikan	2				
SK	Meningkatnya Tata Kelola Pusat Penguatan Karakter					
IKK	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	BB	BB	A	A	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	91,5	92	92,2	92,5	93

4.2. TARGET PENDANAAN

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Pusat Penguatan Karakter mengalami kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini tercermin dari penyesuaian pagu awal sebesar Rp 67.312.457.000 menjadi pagu akhir sebesar Rp 62.179.238.000. Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut atas kebijakan pengendalian belanja pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan ini mengakibatkan pergeseran anggaran sebesar Rp5.133.219.000 untuk mendukung kebijakan strategis nasional, termasuk penguatan Program Indonesia Pintar (PIP) dan kebutuhan prioritas lainnya,



serta pemberlakuan blokir anggaran sebesar Rp20.698.418.000. Dengan pagu akhir tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 41.119.343.159, yang menunjukkan optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui fokus pada pencapaian outcome dan output yang berkontribusi langsung terhadap sasaran kinerja Program Penguatan Karakter.

Selanjutnya, pada tahun 2026, direncanakan kebutuhan anggaran yang mencerminkan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penguatan Karakter secara berkelanjutan. Total kebutuhan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 75,8 miliar, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama dan penguatan prioritas program sesuai arah kebijakan pembangunan karakter.

Pada tahun 2027, seiring dengan peningkatan cakupan dan intensitas program, total kebutuhan anggaran direncanakan meningkat menjadi Rp 86,1 miliar. Kenaikan ini mencerminkan upaya penguatan kualitas intervensi program serta perluasan dampak kegiatan penguatan karakter secara nasional.

Pada tahun 2028, kebutuhan anggaran kembali mengalami peningkatan sejalan dengan tuntutan pencapaian sasaran strategis jangka menengah. Total anggaran yang direncanakan pada tahun ini sebesar Rp 98,0 miliar, yang difokuskan pada konsolidasi hasil program, peningkatan efektivitas implementasi, serta penguatan dukungan terhadap kebijakan prioritas pembangunan karakter.

Adapun pada tahun 2029, sebagai akhir periode perencanaan, kebutuhan anggaran direncanakan sebesar Rp 111,6 miliar. Alokasi ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan hasil program, penguatan dampak jangka panjang, serta pencapaian target strategis Pusat Penguatan Karakter secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Tabel 4.2. Perencanaan Anggaran Penguatan Karakter di PUSPEKA Tahun 2025-2029



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK	Terwujudnya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan					
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	16.824.444	17.529.173	20.158.549	23.182.331	26.659.681
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	26.741.418	37,596,24	43,235,682	49,721,034	57,179,189
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	8.302.365	10,346,13	11,898,060	13,682,769	15,735,185
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter					
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik	10.311.011	10.330.085	10.845.590	11.386.869	11.955.213
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penguatan Karakter minimal BB					
TOTAL		62.179.238	75.801.628	86.137.881	97.973.003	111.529.268



BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung program Kemendikdasmen dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter, yang menjadi fokus pemerintah pada RPJMN. Renstra menjabarkan kebijakan dan strategi pencapaian kinerja Pusat Penguatan Karakter, guna mencapai rencana sasaran kinerja dan program dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemendikdasmen. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan penguatan karakter yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi Unit Utama dan Satuan Kerja di Kemendikdasmen, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memandatkan Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II. dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh komponen ekosistem pendidikan (Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat), serta khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu memperkuat karakter bangsa melalui ekosistem pendidikan selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN
Matrik Target Kinerja Program/Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Renstra Kemendikdasmen 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah											
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik											
IKP 2.3.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu.	persen	8,3%	21,7%	38,3%	53,3%	63,3%					
7576	Kebijakan Penguatan Karakter											
SK	Terwujudnya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan											
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	persen	10	25	45	60	70	16.824.444	17.529.173	20.158.549	23.182.331	26.659.681
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya	persen	10	25	45	60	70	26.741.418	37,596,24	43,235,68	49,721,034	57,179,189
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang	persen	5	15	25	40	50	8.302.365	10,346,13	11,898,06	13,682,769	15,735,185

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya											
7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter											
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter											
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	10.311.011	10.330.085	10.845.590	11.386.869	11.955.213
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	A					